

**PEMETAAN KERUKUNAN DAN KERAWANAN SOSIAL  
KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Oleh: Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA  
Dr. H. Jamaluddin Rabain, M.Us**

**Pendahuluan**

Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi problema yang sangat besar, yakni masalah kerukunan nasional dan kerawanan sosial yang sangat memprihatinkan, bahkan mengkhawatirkan persatuan dan keutuhan negara Indonesia. Kenyataan empiris di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan banyak aksi-aksi kekerasan di tengah-tengah masyarakat melibatkan berbagai unsur dan kelompok, baik etnis maupun agama.

Tampak gejala sebagian masyarakat Indonesia telah kehilangan pegangan dan norma hidup berbangsa dan bernegara yang majemuk. Karena sebagian masyarakat cenderung mempraktekkan kehidupan bebas dan bringas, menonjolkan budaya kekerasan untuk menghancurkan lawan dalam mencari solusi suatu permasalahan. Keteladanan pemimpin juga hampir tidak terlihat, khususnya di tengah-tengah masyarakat yang sedang bertikai. Sementara masyarakat di tingkat bawah semakin menggelorakan fanatisme kesukuan, kedaerahan dan keagamaan. Kondisi ini oleh sebagian kalangan mengindikasikan kerukunan nasional bangsa Indonesia sedang menurun pada titik yang cukup rendah, dan sekaligus menunjukkan kerawanan sosial semakin mengkhawatirkan. Oleh karenanya perlu dikaji secara serius dan mendalam untuk dijadikan bahan antisipasi ke depan.

Kerukunan nasional yang dimaksud bukanlah terbentuknya suatu masyarakat yang bersih dari perbedaan-perbedaan sosial dan sateril dari gesekan-gesekan antar kelompok. Kerukunan nasional justru diharapkan tercipta pada segenap masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang memang majemuk (*multi etnik dan multi agama*) yang ditandai oleh kesadaran dan sikap masing-masing pihak untuk menerima perbedaan-perbedaan, bukan hanya sebagai realitas objektif, tetapi mampu mengembangkannya sebagai potensi dinamik yang memberikan peluang dan harapan kemajuan bersama dan sekaligus kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam kaitan di atas, agaknya perlu dibangun suatu masyarakat yang berwawasan *multikulturalisme* yang tidak hanya tumbuh kesadaran untuk saling mengakui perbedaan, tetapi juga saling menghargai dan menghormati secara tulus, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya, dan yang terpenting berkembang sikap tolong menolong sebagai perwujudan rasa kemanusiaan yang dalam. Ke arah seperti inilah kerukunan nasional bangsa Indonesia yang hendak dikembangkan.

Kebijakan pemerintah Indonesia pada masa lalu yang cenderung sentralistik dan diskriminatif, dipandang sebagai penyebab tidak berkembangnya potensi-potensi lokal dan tidak tumbuhnya wawasan *multikulturalisme* secara maksimal. Akibatnya pilar-pilar kerukunan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lemah dan rapuh. Bidang ekonomi misalnya, dengan jelas terlihat pemerintah kurang mampu mewujudkan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Di bidang politik, belum berhasil menumbuhkan sistem demokrasi yang sehat dan dinamis. Bidang budaya, pemerintah belum mampu memberdayakan, memelihara dan mengembangkan tradisi-tradisi kearifan berbagai daerah. Sedangkan bidang hukum, pemerintah belum berhasil mengayomi dan memberi perlindungan dan keadilan bagi masyarakat lemah.

Kekecewaan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dalam waktu yang lama, memunculkan rasa kebencian dan diiringi pula dengan pengobaran permusuhan terhadap kelompok lain. Kemudian muncul berbagai konflik kekerasan dan kerusuhan massa. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia yang merasakan kekecewaan yang teramat dalam, secara terang-terangan menyatakan kehendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inilah faktor-faktor yang mempersepsikan sebagai penyebab timbulnya berbagai kasus yang memprihatinkan di berbagai daerah di Indonesia.

Berbagai tindak kekerasan yang timbul menunjukkan, bahwa selain rapuhnya kerukunan nasional bangsa Indonesia, juga mengisyaratkan tatanan kerukunan umat beragama dan kehidupan sosial mengalami pergeseran bahkan kerusakan di berbagai tempat. Rusaknya tatanan kerukunan dan kehidupan sosial ini berdampak serius, karena selain ia sebagai pilar utama penyangga kerukunan nasional, juga karena konflik dan kerusuhan massa yang membawa nama agama dan etnik akan mengobarkan semangat perlawanan yang luas dan dahsyat, sulit dipadamkan serta menimbulkan korban yang sangat mengerikan.

Dalam konteks inilah perlu dikaji usaha-usaha membangun dan merawat harmoni sosial yang ada selama ini, sekaligus mencari alternatif baru yang lebih mengena dan berbasis realitas sosial yang aktual dalam masyarakat. Kajian ini didasari suatu asumsi, bahwa problem kerukunan nasional bangsa Indonesia yang tampak dipermukaan saat ini, belum tentu dari penyebab yang sangat sederhana sebagaimana dipersepsikan banyak kalangan, dan belum tentu pula sama masalah yang dihadapi antara satu bangsa dengan bangsa lainnya di kawasan ini. Oleh karena itu, dipandang perlu pengkajian dalam rangka memetakan kondisi kerukunan dan kerawanan sosial masyarakat di kawasan-kawasan yang penduduknya heterogen termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Permasalahan**

Dalam penelitian ini akan dikaji bahaya laten apa sebenarnya yang mengancam keharmonisan hubungan antara kelompok dalam masyarakat. Bagaimana kondisi objektif kehidupan sosial dan relasi antara kelompok masyarakat yang sedang berlangsung saat ini. Apa solusi yang ditempuh selama ini serta bagaimana efektifitasnya jika masyarakat dihadapkan pada persoalan kemajemukan dan pertentangan antar kelompok.

## **Kajian Teori**

Kemajemukan (*plural*) bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak lama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu; *pertama*, majemuk secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. *Kedua*, secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Ciri yang mencolok dari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya agama dan kesukubangsaan yang wujud dalam bentuk komuniti-komuniti sukubangsa dan digunakan sebagai acuan jati diri yang utama. Hubungan kesukubangsaan dan agama adalah hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan sosial yang coraknya berlandaskan pada hubungan antara sukubangsa dan antara pemeluk agama dalam masyarakat setempat.

Di samping itu, agama dan kesukubangsaan (*etnisitas*) dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah sebuah dunia yang primordial (*yang utama dan yang pertama dikenal dalam proses sosialisasi dan enkulturasi*). Karena itu, ia mempunyai fungsi menentukan posisi-posisi para pelaku dari suku bangsa atau pemeluk suatu agama tertentu dalam suatu struktur hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Kesadaran akan kesukubangsaan dan agama masing-masing terhadap pihak lain muncul dan menjadi mantap, karena kemajemukan sukubangsa dan agama bukan hanya terwujud dalam corak masyarakat Indonesia secara nasional, melainkan juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari masyarakat setempat atau lokal.

Pada masa sekarang, hampir tidak ada lagi komuniti sukubangsa dan pemeluk agama yang secara homogen hidup pada suatu daerah. Konsep mengenai sukubangsa dan pemeluk agama lain dalam pertentangannya dengan suku bangsanya dan agamanya sendiri sebagai acuan jatidiri untuk berperan dalam hubungan antara sukubangsa dan antara pemeluk agama, bukan hanya diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebagai perorangan, melainkan juga dari berbagai cerita orang lain, berita media massa, baik cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesukubangsaan dan agama bagi bangsa Indonesia bukan hanya sebuah dunia filosofi, melainkan juga sebuah dunia nyata yang harus mereka hadapi sehari-hari dalam berbagai bentuk ekspresinya, secara sadar maupun tidak sadar (Suparlan dalam Antropologi Indonesia, 2001: 2-3).

Struktur masyarakat majemuk – seperti Indonesia – pada dasarnya tidak bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas sosial. Sebaliknya justru menjadi potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya *civil society* (Heru Nugroho dalam UNISIA, 1999: 129). Pemerintah Indonesia menyebut keberagaman ini dengan akronim SARA, yaitu suku, agama, ras dan antar golongan. Sebagian kalangan menganggap bahwa SARA ini merupakan sumber konflik yang dapat meledak kapan saja dan mengancam integrasi nasional. Oleh karena itu, berbagai peristiwa yang terjadi pada dasawarsa belakangan ini dianggap bernuansa SARA yang harus cepat diselesaikan. Pejabat terkait tidak melakukan pengkajian yang mendalam, apakah

peristiwa tersebut memang murni disebabkan oleh SARA atau faktor lain, dan SARA hanya dijadikan isu untuk membuat eskalasi konflik, karena SARA merupakan persoalan primordial bagi masyarakat Indonesia.

SARA adalah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapa pun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Realitas ini telah menjadi nasib bagi setiap masyarakat di manapun masyarakat itu berada. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah konflik dan disintegrasi, tetapi pada sudut lain (*berdasarkan temuan-temuan historis*) SARA justru dijadikan arena pemberdayaan dan demokrasi (Heru Nugroho dalam UNISIA, 1999: 127).

Mengingat SARA merupakan realitas sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk menguburnya dengan dalih apa pun, termasuk menuju unifikasi melalui "*monolitisasi*" masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan disintegrasi sosial. Kemajemukan masyarakat (*plures*) tidak dapat diseragamkan demi jargon persatuan (*umum*), sebab persatuan sendiri harus dicapai lewat keberadaan pluralitas (Berger dan Neuhauss, 1977).

Memahami realitas historis seperti diungkapkan di atas, maka ideologi dan perspektif memahami SARA harus didekonstruksi, yaitu dari SARA sebagai sumber pemicu perpecahan menjadi SARA sebagai kekuatan untuk pemberdayaan dan demokrasi masyarakat. Namun, langkah pembalikan perspektif saja tidak cukup, sebab dibutuhkan supra dan infra-struktur politik yang memadai dan mendukung proses itu. Salah satu caranya dengan menempatkan peran negara sebatas sebagai fasilitator, dinamisator dan stabilisator kekuatan-kekuatan yang ada dalam komponen-komponen SARA. Jelas, dalam setiap elemen SARA masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda atau bahkan secara diametral dapat berbenturan. Pada titik inilah negara berupaya menjembatani dan mengakomodasi setiap tabrakan kepentingan tersebut, bukan melakukan intervensi yang sangat ideologis dan dominatif.

Perspektif yang memahami SARA sebagai energi pemberdayaan dan demokrasi masyarakat memiliki hulu teori pada pemikiran Peter Berger dan Richard Neuhauss (1977) tentang "*mediating structures*" atau peran institusi-institusi mediasi dalam proses pemberdayaan dan demokrasi. Mereka sepakat bahwa institusi-institusi mediasi yang secara konkret dapat meliputi kelompok ketetangaan, agama, etnis, keluarga dan kelompok keswadayaan (*termasuk kelompok kepentingan*) dapat dimanfaatkan sebagai proses pemberdayaan (*empowering*) masyarakat dalam rangka menghadapi realitas makro atau kebijakan publik. Individu-individu akan merasa tidak berdaya (*powerless*) dalam menyalurkan aspirasinya bila berdiri sebagai person dalam menghadapi negara dan kebijakan-kebijakannya yang impersonal. Mereka akan merasa lebih berdaya kalau menyalurkan kepentingannya lewat institusi-institusi mediasi karena dalam institusi itu sifat personal masih diakui, atau masih ada pengakuan terhadap identitas person, sedang realitas publik sangat impersonal. Berdasarkan kerangka berfikir seperti itu, maka elemen-elemen yang ada dalam SARA juga merupakan

institusi-institusi mediasi yang dapat dimanfaatkan sebagai perberdayaan dalam rangka demokratisasi politik.

Beberapa pandangan menunjukkan pluralisme dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik-konflik sosial, baik karena bertolak dari suatu kepentingan (*vestest interest*) keagamaan yang sempit, maupun yang bertolak dari supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu. Pandangan semacam ini sepenuhnya tidak dapat disalahkan, karena dalam banyak kasus di beberapa negara termasuk Indonesia banyak terjadi konflik yang dilatarbelakangi oleh persoalan pluralisme demikian. (Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994: 33).

Dalam kehidupan modern, masalah pluralisme dapat dikatakan sebagai agenda kemanusiaan yang perlu mendapat respon secara arif dan konstruktif. Dikatakan demikian, karena bagaimanapun pluralisme merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari. Ia merupakan bagian dari *sunnatullah*, sebagai kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan.

Penyelesaian implikasi negatif dari pluralisme tidak harus dengan cara yang mengarah pada pengingkaran kenyataan pluralisme itu sendiri. Cara demikian, seringkali nampak pada upaya menciptakan suatu hegemonitas berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pencegahan implikasi negatif pluralisme yang perlu dilakukan pertama-tama adalah pengembangan sikap arif dalam menerima pluralisme. Berikutnya, bagaimana mengembangkan pluralisme menjadi kekuatan sinergis dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Dalam konteks ini, agama dan demokrasi mempunyai peran strategis. Agama dalam konteks pluralisme akan menjadi landasan etis, sementara demokrasi akan menjadi semacam *common denominator*.

Sikap agama terhadap pluralisme sangat jelas. Agama tidak menolak adanya pluralisme, bahkan agama memberikan kerangka sikap etis. Dari sudut pandang ajaran Islam, sikap positif tersebut dan kerangka sikap etis yang harus dikembangkan tercermin dalam beberapa ayat al-Quran yang secara eksplisit mengakui kenyataan tersebut (QS. 49:13, QS. 30:22, QS. 5:48). Agama-agama lain, misalnya dalam Kristen terdapat kecenderungan pemikiran yang sama dalam menghadapi persoalan pluralisme. Sebelumnya, terdapat persoalan teologis dalam Kristen yang menjadi kendala utama pengembangan dialog dengan agama lain. Persoalan tersebut berhubungan dengan masalah keselamatan di luar Kristus (*sateriologi*). Sebelum konsili Vatikan II, terdapat penafsiran yang salah tentang kalimat *extra ecelisian nulla salus* (di luar gereja tidak ada keselamatan). Dengan diterbitkannya naskah *Nostra aetate*, Gereja Katolik Roma mengakui eksistensi agama-agama lain (Tebba, 1993).

Perkembangan teologi Kristiani di atas, menurut Tillich tidak bisa dilepaskan dari perjumpaan Kristen dengan agama-agama lain. Dalam perjumpaan tersebut, banyak teolog Kristen yang kemudian menarik kesimpulan bahwa teologi Kristen tidak dapat terus dirumuskan terpisah dari agama-agama lain. Kesimpulan demikian kemudian memandang bahwa perkembangan teologi Kristen di masa yang akan datang merupakan hasil langsung dari dialog yang serius dengan agama-agama lain (Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994: 34-35).

Dalam diskursus teologis Kristen mengenai persoalan dialog agama-agama, berkembang pemikiran yang mengarah pada perlunya pendekatan dialogis. Dalam konteks teologi Kristen, dialog demikian tidak dimaksudkan untuk menyelaraskan atau menyamakan keyakinan agama-agama, melainkan pengakuan bahwa tiap-tiap orang beragama memiliki keyakinan yang teguh dan mutlak, dan juga keyakinan-keyakinan itu memang berbeda. Dialog teologi Kristen bertolak dari suatu asumsi utama, bahwa tiap-tiap agama mempunyai tuntutan mutlak yang tidak dapat dinisbikan (Coward, 1989).

Kerukunan antar umat beragama akan tercipta bukan karena kemajemukan agama yang merupakan *sunnatullah*, dan bukan dikondisikan oleh proses relativisasi dan liberalisasi maupun sekularisasi. Kerukunan akan lebih banyak dikondisikan oleh kualitas pemahaman, penghayatan dan aktualisasi keberagamaan setiap pemeluk agama yang bersangkutan. Dalam kasus Indonesia, masih perlu diupayakan peningkatan kualitas keberagamaan yang selama ini aspek emosional sebagian besar pemeluk agama masih dominan. Kecenderungan demikian yang menyebabkan pluralisme agama banyak dilihat, dipandang dan ditempatkan sebagai ancaman.

Dengan demikian, persoalan pluralitas agama dan suku bangsa merupakan fakta sosiologis yang tidak dapat dihindari oleh bangsa ini. Ini mengandung arti, bahwa dalam satu masyarakat hidup kelompok-kelompok agama dan suku bangsa yang berbeda-beda. Secara teoretis, manusia cenderung untuk hidup atau tinggal berdekatan dengan kelompoknya baik dari sisi agama maupun etnis yang sering disebut dengan *ingroup* (Hendropuspito, 1989: 48). Mereka akan merasa aman apabila hidup di dalam "*kelompok*"nya, dan mereka akan menghindari untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang di luar "*kelompok*"nya. Kecenderungan seperti ini tentu saja akan membuat wilayah tertentu dikuasai atau didominasi oleh kelompok tertentu pula. Fenomena lain yang juga menarik untuk diperhatikan adalah, adanya asosiasi etnis tertentu terhadap agama tertentu (Hendropuspito, 1994: 158). Ini mengandung arti bahwa etnis tertentu sering dihubungkan dengan agama tertentu, yang tentu saja akan menambah besarnya potensi terjadinya konflik di tengah masyarakat.

### **Metodologi**

Bagian ini menguraikan bagaimana cara penelitian dilaksanakan. Secara rinci hal-hal yang akan diungkap dalam bagian ini meliputi; metode penelitian yang digunakan, penentuan lokasi penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

### **Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami keberadaan yang saling berhubungan antara berbagai gejala eksternal maupun internal yang terdapat dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Pendeskripsian maupun pengungkapan tentang fenomena-fenomena empirik sebagai realitas obyektif masyarakat, akan lebih ditekankan pada metode deskriptif.

Penelitian deskriptif menggambarkan dengan tepat mengenai sifat individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu, menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat (Garna, 1999: 32 ; Moleong, 1989: 2-3).

Metode penelitian kualitatif merujuk kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dituturkan orang, baik lisan maupun tulisan, apa yang dilakukan orang, yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keluasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya serta dalam peristilahannya (Bogdan & Taylor, 1993: 4).

### **Lokasi Penelitian**

Skop penelitian ini Provinsi Riau dengan mengambil sampel di Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan kota Pekanbaru. Dipilihnya lokasi tersebut didasarkan kepada bahwa tingkat keberagaman keagamaannya sangat tinggi dan fenomena kerukunan antar umat beragama terdapat di daerah ini.

### **Data yang diperlukan**

Data pokok (*data primer*) yang dikumpulkan dalam penelitian ini terpusat pada fenomena-fenomena yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian ini; yaitu peta penyebaran umat beragama, yang meliputi jumlah penganut suatu agama, jumlah rumah ibadah, jumlah organisasi keagamaan, jumlah tokoh-tokoh dan penyiar agama, aliran-aliran keagamaan, hubungan sosial keagamaan yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, kebijakan pemerintah dalam pembinaan kehidupan beragama dan data-data lain yang dipandang terkait dengan penelitian ini, dan dibatasi berdasarkan relevansi dengan pertanyaan dasar dalam rencana penelitian, yang keseluruhannya akan ditempatkan dalam kerangka analisis sosiologi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk pengumpulan data di lapangan sebagai data primer, juga digunakan beberapa alat pengumpul data, yaitu observasi, wawancara dan angket.

#### **Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti letak bangunan rumah ibadah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan dan lain-lain.

#### **Wawancara**

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (Soehartono, 1995: 67-68). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tak-berstruktur dengan tujuan agar memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam mengenai pandangan informan tentang hal-hal yang sedang diteliti. Nasution (1996: 73) menyebutkan tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung

dalam pikiran dan hati orang lain, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi.

### **Dokumentasi.**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Purnomo, 1996: 73). Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi (Soehartono, 1995: 70). Melalui teknik ini akan diperoleh data-data sekunder yang didapat baik dari kantor statistik maupun kantor urusan agama.

### **Teknik Analisis Data.**

Kegiatan dalam menganalisis data dimulai dari klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi, sampai pada pembahasan. Pengolahan data atau analisis deskriptif (*descriptive analysis*) mengandung pengertian sebagai usaha untuk menyederhanakan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi, sehingga tersusun suatu rangkaian deskripsi yang sistematis dan akurat. Dari data yang diperoleh di lapangan, akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori sosiologi, sehingga akan terlihat dengan jelas peta penyebaran umat beragama dan pola kerukunan umat beragama di Indonesia.

### **Road Map Penelitian**

- a. Persiapan; meliputi diskusi metodologi dan menyiapkan perangkat-perangkat keras dan lunak, dan melakukan observasi awal
- b. Penelitian; tahap ini meliputi pengumpulan data-data tekstual, wawancara, observasi, analisis dan sampai pada penulisan hasil penelitian dan pembuatan peta.
- c. Seminar; tahap ini dimaksudkan untuk menguji dan mensosialisasikan hasil penelitian. Di samping juga untuk pematangan kesimpulan sebelum hasil tersebut dibukukan.
- d. Penerbitan; tahap ini dimaksudkan untuk mengabadikan hasil-hasil penelitian yang telah dimatangkan melalui seminar. Beberapa proses di dalamnya termasuk editing, setting/layout, rancang cover, dan cetak.
- e. Distribusi; laporan ini akan dikirim ke lembaga-lembaga agama yang ada, instansi pemerintah dan swasta serta kalangan masyarakat luas.

### **Bibliografi**

Abdullah, Amin, 1996. *Studi agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ali, H.A., Mukti, 1971. *Alam Pemikiran Modern di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan "NIDA".

Berger, Peter L. & Richard J. Neuhaus, 1977. *To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy*, Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research.



Bogdan, R. & S.J. Tylor, 1993. *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian* (terjemahan), Surabaya: Usaha Nasional.

Coward, Harold, 1989. *Pluralisme Tantangan Agama-Agama* (terjemahan), Yogyakarta: Kanisius.

Garna, Judistira K., 1999. *Metoda Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Primaco Akademika.

Hendropuspito, D., 1989. *Sosiologi Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius.

Hendropuspito, D., 1994. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius.

Hodgson, Marshall, G.S., 1974. *The Venture of Islam*, Chicago: The University of Chicago Press.

Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution, S., 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Nugroho, Heru, 1999. "Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi" dalam *Jurnal UNISIA* No. 40/XXII/IV, Yogyakarta: UII

Soehartono, Irawan, 1995. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Rosadakarya.

Suparlan, Parsudi, 2001. "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 66 Sept-Des., Jakarta: UI.

Tebba, Sudirman, 1993. *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Tobroni dan Syamsul Arifin, 1994, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: SI Press.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

